

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2021**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MOJOKERTO
2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan hidayahNya akhirnya Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2019 dapat diselesaikan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 pasal 27 ayat (1) dan Permendagri No. 54 Tahun 2010 Passal 137, Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto merupakan substansi dari penjabaran Rencana Kerja Kota Mojokerto, berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Program Wajib Politik Dalam Negeri, rincian tugas pokok dan fungsi yang bersinergi dengan Program Pemerintah Kota Mojokerto. Rencana Kerja (Renja) disusun dengan maksud memberikan arah dan menyediakan data resmi atau pedoman dalam mewujudkan visi, misi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai pedoman kerja yang disampaikan melalui RKA dan DPA Tahun 2021.

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja adalah untuk mengakomodir aspirasi maupun keinginan masyarakat agar dapat diwujudkan melalui program kegiatan tahunan dapat terfasilitasi, tranparansi, efektif dan efisien untuk menuju tata pemerintahan yang baik (good govermence) dan bertanggungjawab.

Akhirnya dengan segala keterbatasan kemampuan dan waktu penyusunan RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini, diharapkan kritik, saran dan masukan untuk perbaikan demi penyempurnaannya

Mojokerto, Juli 2020

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MOJOKERTO

ANANG FAHRUROJI, S.Sos,M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19670807 199203 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II. HASIL EVALUASI PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	8
2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	23
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	23
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	32
BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	34
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	34
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	34
3.3. Program dan Kegiatan.....	36
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	43
BAB V. PENUTUP.....	45
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program dan kegiatan pembangunan. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen Rencana Kerja yang disusun oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya guna mengoperasionalkan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk tahun rencana yang dimaksud. Renja Perangkat Daerah juga merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya.

Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan berdasarkan Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD.

Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada rancangan awal RKPD ;
- b. Rumusan program kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib dan ataupun pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah ;
- c. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD ;
- d. Rumusan program kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib dan atau pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah ;
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kota Mojokerto berdasarkan pada perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;

11. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2014-2019;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah;
13. Perwali Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tupoksi Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik Kota Mojokerto.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) Bakesbangpol adalah Rencana dan Program Kerja Tahunan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2021 adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang politik dan pelayanan masyarakat, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan dapat tercapai.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Memberikan informasi kepada kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana kegiatan tahunan.
4. Menjadi kerangka dasar dan alat ukur kinerja pelayanan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2021 adalah :

1. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.

3. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
4. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan.
5. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
6. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders).
7. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi masa depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2020 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1,1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja K/L dan Renja Provinsi serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun 2019) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2020), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Kota Mojokerto maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kelurahan/Kecamatan

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto tahun lalu (tahun 2019) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2020) yang mengacu pada APBD tahun berjalan yang pada waktu penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto sudah disahkan, sebagaimana tabel 2.1 berikut

Tabel 2.1
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019
1	2	3	4	5	6	7
1	Menguatkan ketahanan sosial masyarakat	Menguatnya ketahanan sosial masyarakat	Jumlah konflik Ipoleksosbud Jumlah konflik SARA Persentasi konflik Ipoleksosbud yang diselesaikan Persentasi konflik SARA yang diselesaikan Persentasi LSM/Ormas/Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	14 konflik 1 konflik 100% 100% 32,69%	14 konflik 0 100% 100% 32,70%	100 % 100 % 100% 100% 100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa (tahun 2019) :

- Tujuan : Memperkuat ketahanan sosial masyarakat, dengan Indikator Tujuan : (1). Jumlah konflik Ipoleksosbud, dengan target 14 konflik, realisasi 14 konflik, sehingga capaian kinerja 100 %, (2). Jumlah konflik SARA, dengan target 1 konflik, realisasi 0, sehingga capaian kinerja 100 %.
- Sasaran : Memperkuatnya ketahanan sosial masyarakat, dengan Indikator Sasaran : (1). Persentase konflik IPOLEKSOSBUD yang diselesaikan, Target 100 %, realisasi 100 %, sehingga capaian kinerja 100 %; (2). Persentase konflik SARA yang diselesaikan, Target 100 %, realisasi 100 %, sehingga capaian kinerja 100 % ; (3) Persentase LSM/Ormas/Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan, dengan Target 32,69 %, realisasi 32,70 %, sehingga capaian kinerja 100 %

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun-tahun sebelumnya.

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto tahun lalu dan realisasi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto dan/atau realisasi APBD, sebagaimana tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2020
KOTA MOJOKERTO

Kode SKPD : 105.01
Nama SKPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MOJOKERTO

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pprogram/Kegiatan	Indikator Kinerja program (outcome)/kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rensra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan			Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1.05.01.01.12	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik	100 %							
1.05.01.01.12.01	Pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah rekening telepon, listrik, internet dan PDAM kantor yang dibayarkan tepat waktu	60 bulan	0 Bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	40%
		Jumlah kendaraan dinas/operasional	35 unit	0 Unit	7 Unit	7 unit	100%	7 unit	14 unit	40%

yang dirawat secara berkala														
Jumlah Pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	50	orang	0	Orang	10	orang	10	orang	100%	10	orang	20	orang	40%
Jumlah petugas kebersihan dan sopir yang honorariumnya dibayarka tepat waktu	20	orang	0	Orang	4	orang	4	orang	100%	4	orang	8	orang	40%
Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	250	unit	0	Unit	50	unit	50	unit	100%	50	unit	100	unit	40%
Jumlah ATK yang disediakan	135	macam	0	Macam	27	macam	27	macam	100%	27	macam	54	macam	40%
Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	40	macam	0	Macam	8	macam	8	macam	100%	8	macam	16	macam	40%
Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang	55	macam	0	Macam	11	macam	11	macam	100%	11	macam	22	macam	40%

		disediakan														
		Jumlah bahan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	10	macam	0	Macam	2	macam	2	macam	100%	2	macam	4	macam	40%
		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	185	macam	0	Macam	37	macam	37	macam	100%	37	macam	74	macam	40%
		Jumlah makan minum kantor yang disediakan	6.000	kotak	0	Kotak	1.200	kotak	1.200	kota	100%	1.200	kotak	2.400	kotak	40%
		Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah	1000	kali	0	Kali	200	Kali	200	kali	100%	200	kali	400	kali	40%
1.05.01.01.12.02	Pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang tersedia	55	unit	0	Unit	11	Unit	11	unit	100%	11	unit	22		40%
		Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	50	unit	0	Unit	10	Unit	10	unit	100%	10	unit	20		40%
		Jumlah kebutuhan	20	unit	0	Unit	4	Unit	4	unit	100%	4	unit	8	unit	40%

	komputer dan kelengkapannya														
	Jumlah gedung/kantor yang dipelihara	5	unit	0	Unit	1	Unit	1	unit	100%	1	unit	2	unit	40%
	Jumlah petugas keamanan gedung kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	10	unit	0	Unit	2	Unit	2	unit	100%	2	unit	4	unit	40%
	Jumlah pakaian khusus	300	potong	0		60	potong	60	potong	100%	60	potong	120		40%
Pengelolaan administrasi keuangan	Jumlah laporan keuangan (Neraca, CALK, LRA, RKA, RKAP, DPA, DPAP)	35	dokumen	0	Dokumen	7	dokumen	7	dokumen	100%	7	dokumen	14	dokumen	40%
Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Renstra, Renja, Renja Peubahan, LPPD, LKPJ, SAKIP, PK, RTP, Laporan kinerja, SPIP, Sinovik, SOP)	55	dokumen	0	Dokumen	11	dokumen	11	dokumen	100%	11	dokumen	22	dokumen	40%
Pengembangan	Jumlah buku profil	50	buku	0	Buku	10	buku	10	buku	100%	10	buku	20	buku	40%

	data dan sistem informasi	yang disusun													
1.05.01.01.17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase peningkatan peserta yang mendapatkan/mengikuti pendidikan wawasan kebangsaan	4,56	%											
1.05.01.01.17.03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah peserta Bela Negara dan cerdas cermat	850	orang	0	170	orang	170	orang	100%	170	orang	340	orang	40%
		Jumlah perusahaan swasta yang dibina wawasan kebangsaan	15	perush	0	3	perush	3	perush	100%	3	perush	6	perush	40%
		Jumlah pendidikan wawasan kebangsaan	40	kali	0	8	Kali	8	kali	100%	8	kali	16	kali	40%
1.05.01.01.17.07	Fasilitasi dan koordinasi upacara	Jumlah upacara rutin, hari besar nasional, HUT Kemerdekaan RI, Hari Jadi Kota, Hari Santri yang diselenggarakan sesuai SOP	115	kali	0	23	Kali	23	kali	100%	23	kali	46	kali	40%
1.05.01.01.21	Program	Persentase	67,29	%											

	Pendidikan Politik Masyarakat	LSM/Ormas/Parpol yang aktif													
1.05.01.01.21.01	Penyuluhan kepada Masyarakat	Jumlah LSM/Ormas/Parpol yang dibina	1000	orang	0	200	orang	200	orang	100%	200	orang	400	orang	40%
		Jumlah LSM/Ormas yang berpartisipasi dalam Jambore	1000	orang	0	200	orang	200	orang	100%	200	orang	400	orang	40%
		Jumlah LSM/Ormas yang mengikuti Forum Diskusi Ormas	500	orang	0	100	Orang	100	orang	100%	100	orang	200	orang	40%
1.05.01.01.21.03	Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik	Jumlah peserta pendidikan politik masyarakat	1800	orang	0	360	orang	360	orang	100%	360	orang	720	orang	40%
		Jumlah Parpol yang terdaftar dan yang dibina	45	orang	0	9	orang	9	orang	100%	9	orang	18	orang	40%
		Jumlah laporan pemantauan perkembangan politik, verifikasi bantuan keuangan Parpol	20	orang	0	4	orang	4	orang	100%	4	orang	8	orang	40%

1.05.01.01.23	Program Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan Nasional	Persentase konflik IPOLEKSOSBUD yang ditangani	100	%											
1.05.01.01.23.07	Pemantapan kewaspadaan nasional	Jumlah Rakor FKDD, FKDM dan fasilitasi ketahanan bangsa	135	kali	0	27	Kali	27	kali	100%	27	kali	54	kali	40%
		Jumlah Rakor Tim Terpadu Pencegahan, Pemberantasan, Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	30	kali	0	6	Kali	6	kali	100%	6	kali	12	kali	40%
		Jumlah peserta deseminasi P4GN	500	orang	0	100	orang	100	orang	100%	100	orang	200	orang	40%
1.05.01.01.23.08	Pembinaan kewilayahan	Jumlah pembinaan wilayah	90	Kelurahan	0	18	Kel	18	Kel	100%	18	Kel	36	Kel	40%
		Jumlah Rakor Forkopimda yang diselenggarakan	40	kali	0	8	Kali	8	kali	100%	8	kali	16	kali	40%
		Jumlah study komparasi yang diikuti Forpimda	5	kali	0	1	Kali	1	kali	100%	1	kali	2	kali	40%

1.05.01.01.23.09	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah konflik SARA yang ditangani	5 kali	0	1 Kali	1 kali	100%	1 kali	2 kali	40%
		Jumlah pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	65 kali	0	13 Kali	13 kali	100%	13 kali	26 kali	40%
		Jumlah Rakor FKUB	50 kali	0	10 Kali	10 kali	100%	10 kali	20 kali	40%
		Jumlah Rakor Tim Instruksi Hari Besar Keagamaan	20 kali	0	4 Kali	4 kali	100%	4 kali	8 kali	40%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah. Hasil analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto, sebagaimana tabel 2.3 berikut :

TABEL 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA MOJOKERTO

NO.	INDIKATOR	SPM/ STAN DAR NASIO NAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				Tahun 2018 (Tahun n-2)	Tahun 2019 (Tahun n-1)	Tahun 2020 (Tahun n)	Tahun 2021 (Tahun n+1)	TAHUN 2018 (TAHUN n- 2)	TAHUN 2019 (TAHUN n-1)	TAHUN 2020 (Tahun n)	TAHUN 2021 (TAHUN n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Prosentase peningkatanpeserta yang mendapatkan/mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
			Jumlah peserta Bela Negara dan Cerdas Cermat	170 orang	170 orang	170 orang	170 orang	170 orang	170 orang	170 orang	170 orang	
			Jumlah perusahaan swasta yang dibina wawasan kebangsaan	6 perush	6 perush	6 perush	6 perush	6 perush	6 perush	6 perush	6 perush	
			Jumlah peserta pendidikan wawasan kebangsaan	900 orang	900 orang	900 orang	900 orang	900 orang	900 orang	900 orang	900 orang	
			Jumlah upacara rutin, hari besar	23 kali	23 kali	23 kali	23 kali	23 kali	23 kali	23 kali	23 kali	

nasional, HUT
Kemerdekaan RI,
hari jadi Kota, hari
santri yang
diselenggarakan
sesuai SOP

II	Prosentase LSM/Ormas/Parpol yang telah memenuhi persyaratan	Jumlah LSM/Ormas/Parpol yang dibina	85 %	200 ora ng	33 %	200 ora ng	67,29 %	200 ora ng	92 %	200 ora ng	85 %	200 ora ng	87 %	200 ora ng	90 %	200 ora ng	92 %	200 ora ng
		Jumlah LSM/Ormas yang berpartisipasi dalam jambore		200 ora ng		200 ora ng		200 ora ng		200 ora ng		200 ora ng		200 ora ng		200 ora ng		200 ora ng
		Jumlah LSM/Ormas/Parpol yang mengikuti forum diskusi Ormas		100 ora ng		100 ora ng		100 ora ng		100 ora ng		100 ora ng		100 ora ng		100 ora ng		100 ora ng
		Jumlah peserta pendidikan politik masyarakat		360 ora ng		360 ora ng		360 ora ng		360 ora ng		360 ora ng		360 ora ng		360 ora ng		360 ora ng
		Jumlah Parpol yang terdaftar dan yang dibina		9 kelo mp		9 kelo mp		9 kelo mp		9 kelo mp		9 kelo mp		9 kelo mp		9 kelo mp		9 kelo mp

			Jumlah Laporan pemantauan perkembangan politik, verifikasi bantuan keuangan Parpol	4 laporan								
III	Prosentase masyarakat yang telah menerima pembinaan serta keamanan dan ketentraman			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Jumlah pembinaan FKDM dan fasilitasi ketahanan bangsa	27 kali								
			Jumlah Rakor tim terpadu pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, peredaran gelap narkoba (P4GN)	100 orang								
			Jumlah peserta deseminasi P4GN	100 orang								
			Jumlah pembinaan	18 Kel	18 Kelur	18 Kelur	18 Kel	18 Kelu	18 Kelur	18 Kel	18 Kelu	18 Kelu

		wilayah	ura han	ahan	ahan	ura han	raha n	ahan	ura han	raha n
		Jumlah Rakor Forkopimda yang diselenggarakan	8 kali	8 kali	8 kali	8 kali	8 kali	8 kali	8 kali	8 kali
		Jumlah study komparasi yang diikuti Forpimda	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
		Jumlah konflik SARA yang ditangani	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali
		Jumlah pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	13 kali	13 kali	13 kali	13 kali	13 kali	13 kali	13 kali	13 kali
		Jumlah Rakor FKUB	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali	10 kali
		Jumlah Rakor Tim Instruksi Hari Besar keagamaan	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan kesatuan bangsa dan politik tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Bakesbangpol meliputi SDM, sarana dan prasarana serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi :

1. Memberdayakan kebhinekaan Indonesia dan peningkatan pemahaman etika kebangsaan dan bernegara;
2. Memelihara dan menghormati komunitas kehidupan politik yang berorientasi pada pengembangan masyarakat madani yang di cita-citakan ;
3. Memelihara kewaspadaan nasional agar terhindar dari upaya pemecahbelahan bangsa (disintegrasi bangsa) ;
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban ;
5. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pendidikan politik yang berkesinambungan ;
6. Mengembangkan kreatifitas masyarakat dengan memberikan dorongan kearah kehidupan politik yang menghormati HAM, berkeadilan, bertanggungjawab dan mampu berkompetisi secara sehat dan dinamis.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam upaya mewujudkan misi ketentraman dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum, maka program pembangunan yang akan dilakukan adalah sebagaimana tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Kota Mojokerto

Nama PD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pelayanan Kesekretaria tan	Kota Mojokerto	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik	100%	1.051.729.470,00	Program Pelayanan Kesekretariat an	Kota Mojokerto	Persentase sarana dan prasarana Perangkat Daerah yang tersedia secara cukup dan dengan kualitas baik	100%	1.051.729.470,00	
1	Pelayanan administrasi perkantoran		Jumlah rekening listrik, telepon, internet dan PDAM yang dibayarkan tepat waktu	12 bln	713.526.070,00	Pelayanan administrasi perkantoran	Kota Mojokerto	Jumlah rekening listrik, telepon, internet dan PDAM yang dibayarkan tepat waktu	12 bln	713.526.070,00	
			Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	11 unit				Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	11 unit		
			Jumlah Pengelola	10 orang				Jumlah Pengelola	10 orang		

		keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu			keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu		
		Jumlah petugas kebersihan dan sopir yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	4 orang		Jumlah petugas kebersihan dan sopir yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	4 orang	
		Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	50 unit		Jumlah peralatan kerja kantor yang diperbaiki	50 unit	
		Jumlah ATK yang disediakan	27 macam		Jumlah ATK yang disediakan	27 macam	
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 macam		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8 macam	
		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11 macam		Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	11 macam	
		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan yang dibaca/	2 macam		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan yang dibaca/ dimanfaatkan	2 macam	

			dimanfaatkan								
			Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	37 macam			Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	37 macam			
			Jumlah makan dan minum kantor yang disediakan	1200 kotak			Jumlah makan dan minum kantor yang disediakan	1200 kotak			
			Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah	200 kali			Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah	200 kali			
2	Peningkatan sarana dan prasarana aaratur	Kota Mojokerto	Jumlah perlengkapan gedung kantor	11 unit	278.203.400,00	Peningkatan sarana dan prasarana aaratur	Jumlah perlengkapan gedung kantor	11 unit	278.203.400,00		
			Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	10 unit			Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	10 unit			
			Jumlah kebutuhan komputer dan kelengkapannya	4 unit			Jumlah kebutuhan komputer dan kelengkapannya	4 unit			
			Jumlah gedung/kantor yang dipelihara	1 unit			Jumlah gedung/kantor yang dipelihara	1 unit			

			Jumlah petugas keamanan gedung kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	2 orang				Jumlah petugas keamanan gedung kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	2 orang	
			Jumlah pakaian khusus	60 potong				Jumlah pakaian khusus	60 potong	
3	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kota Mojokerto	Jumlah laporan keuangan (Neraca, CALK, LRA, RKA, RKAP, DPA, DPAP)	7 dokumen	10.000.000,00	Pengelolaan Administrasi Keuangan	Kota Mojokerto	Jumlah laporan keuangan (Neraca, CALK, LRA, RKA, RKAP, DPA, DPAP)	7 dokumen	10.000.000,00
4	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	Kota Mojokerto	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Renstra, Renja, Renja Perubahan, LPPD, LKPJ, SAKIP, PK, RTP, Lap.Kinerja, SPIP, Sinovik, SOP)	12 dokumen	40.000.000,00	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	Kota Mojokerto	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (Renstra, Renja, Renja Perubahan, LPPD, LKPJ, SAKIP, PK, RTP, Lap.Kinerja, SPIP, Sinovik, SOP)	12 dokumen	40.000.000,00
5	Pengembangan data dan	Kota Mojokerto	Jumlah buku Profil yang disusun		10.000.000,00	Pengembangan data dan sistem	Kota Mojokerto	Jumlah buku Profil yang disusun		10.000.000,00

	sistem informasi					informasi				
II	Program Pengembangan wawasan kebangsaan	Kota Mojokerto	Persentase peningkatan peserta yang mendapatkan /mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan	95%	1.001.042.410,00	Program Pengembangan wawasan kebangsaan	Kota Mojokerto	Persentase peningkatan peserta yang mendapatkan /mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan	95%	1.001.042.410,00
1	Peningkatan Kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Kota Mojokerto	Jumlah peserta bela negara dan cerdas cermat	170 orang	385.939.110,00	Peningkatan Kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Kota Mojokerto	Jumlah peserta bela negara dan cerdas cermat	170 orang	385.939.110,00
			Jumlah perusahaan swasta yang dibina wawasan kebangsaan	6 perush				Jumlah perusahaan swasta yang dibina wawasan kebangsaan	6 perush	
			Jumlah peserta pendidikan wawasan kebangsaan	900 orang				Jumlah peserta pendidikan wawasan kebangsaan	900 orang	
2	Fasilitasi dan Koordinasi upacara	Kota Mojokerto	Jumlah upacara rutin, hari besar nasional, HUT Kemerdekaan RI, hari jadi Kota, hari santri yang diselenggarakan sesuai SOP	23 kali	615.103.300,00	Fasilitasi dan Koordinasi upacara	Kota Mojokerto	Jumlah upacara rutin, hari besar nasional, HUT Kemerdekaan RI, hari jadi Kota, hari santri yang diselenggarakan sesuai SOP	23 kali	615.103.300,00

III	Program Pendidikan Politik masyarakat	Kota Mojokerto	Persentase LSM/Ormas/Parpol yang telah memenuhi persyaratan	67,29%	684.426.600,00	Program Pendidikan Politik masyarakat	Kota Mojokerto	Persentase LSM/Ormas/Parpol yang telah memenuhi persyaratan	67,29%	684.426.600,00	
1	Penyuluhan kepada masyarakat	Kota Mojokerto	Jumlah LSM/Ormas/Parpol yang dibina	200 orang	354.000.000,00	Penyuluhan kepada masyarakat	Kota Mojokerto	Jumlah LSM/Ormas/Parpol yang dibina	200 orang	354.000.000,00	
			Jumlah LSM/Ormas yang berpartisipasi dalam jambore	200 orang				Jumlah LSM/Ormas yang berpartisipasi dalam jambore	200 orang		
			Jumlah LSM/Ormas yang mengikuti forum diskusi Ormas	100 orang				Jumlah LSM/Ormas yang mengikuti forum diskusi Ormas	100 orang		
2	Koordinasi forum-forum diskusi politik	Kota Mojokerto	Jumlah peserta pendidikan politik masyarakat	360 orang	330.426.600,00	Koordinasi forum-forum diskusi politik	Kota Mojokerto	Jumlah peserta pendidikan politik masyarakat	360 orang	330.426.600,00	
			Jumlah Parpol yang terdaftar dan yang	9 Parpol				Jumlah Parpol yang terdaftar dan yang	9 Parpol		

			dibinna								
			Jumlah laporan pemantauan perkembangan politik, verifikasi bantuan keuangan Parpol	4 laporan				Jumlah laporan pemantauan perkembangan politik, verifikasi bantuan keuangan Parpol	4 laporan		
IV	Program Pembinaan dan pengembangan kewaspadaan nasional	Kota Mojokerto	Persentase masyarakat yang telah menerima pembinaan serta keamanan dan ketentraman	100%	3.082.511.340,00	Program Pembinaan dan pengembangan kewaspadaan nasional	Kota Mojokerto	Persentase masyarakat yang telah menerima pembinaan serta keamanan dan ketentraman	100%	3.082.511.340,00	
1	Pemantapan Kewaspadaan Nasional	Kota Mojokerto	Jumlah Rakor FKDD dan FKDM dan Fasilitas ketahanan bangsa	27 kali	862.042.450,00	Pemantapan Kewaspadaan Nasional	Kota Mojokerto	Jumlah Rakor FKDD dan FKDM dan Fasilitas ketahanan bangsa	27 kali	862.042.450,00	
			Jumlah Rakor Tim Terpadu Pencegahan, Pemberantasan, Peredaran Gelap Narkoba	6 kali				Jumlah Rakor Tim Terpadu Pencegahan, Pemberantasan, Peredaran Gelap Narkoba	6 kali		
2	Pembinaan Kewilayahan	Kota Mojokerto	Jumlah peserta deseminasi P4GN	100 orang				Jumlah peserta deseminasi P4GN	100 orang		
			Jumlah pembinaan wilayah	18 Kelurahan	1.855.239.750,00	Pembinaan Kewilayahan	Kota Mojokerto	Jumlah pembinaan wilayah	18 Kelurahan	1.855.239.750,00	

3	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Kota Mojokerto	Jumlah Rakor Fprkopimda yang diselenggarakan	8 kali	365.229.140,00	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Kota Mojokerto	Jumlah Rakor Fprkopimda yang diselenggarakan	8 kali	365.229.140,00	
			Jumlah study komparasi yang diikuti Forpimda	1 kali				Jumlah study komparasi yang diikuti Forpimda	1 kali		
			Jumlah konflik SARA yang ditangani	1 kali				Jumlah konflik SARA yang ditangani	1 kali		
			Jumlah pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	13 kali				Jumlah pembinaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	13 kali		
			Jumlah Rakor FKUB	10 kali				Jumlah Rakor FKUB	10 kali		
			Jumlah Rakor Tim Instruksi Hari besar keagamaan	4 kali				Jumlah Rakor Tim Instruksi Hari besar keagamaan	4 kali		
					5.819.709.820,00						5.819.709.820,00

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program/kegiatan yang diperoleh dari hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021, tidak ada program/kegiatan yang diusulkan dari pemangku pimpinan (stakeholder) baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan , LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kota Mojokerto.

Hasil pengerjaan pada bagian penelaah usulan program dan kegiatan dari masyarakat, sebagaimana tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021
Kota Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Mojokerto

No.	program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol adalah :

1. Program Pengembangan Wawasan kebangsaan
2. Program Pendidikan Politik masyarakat
3. Program Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja PD

Visi pembangunan daerah Kota Mojokerto untuk periode 2018 -2023 sesuai dengan visi Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Kota Mojokerto yang berdaya saing, mandiri, demokratis, adil, makmur, sejahtera dan bermartabat”

Untuk mewujudkan visi Pembanguna Kota Mojokerto yang telah ditetapkan, maka Bakesbangpol Kota Mojokerto sesuai **Misi 5** dari Misi Pembangunan Kota Mojokerto 2018 – 2023 sebagai berikut:

“Mewujudkan ketahanan sosial budaya dalam kerangka integrasi nasional pada tatanan masyarakat yang bermartabat, berakhlak mulia, beretika dan berbudaya luhur berlandaskan Pancasila”

Berdasarkan misi yang telah dirumuskan di atas, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menetapkan tujuan dan sasaran dan indikatornya sebagai berikut:

Tabel 3.1

Tujuan, Sasaran dan Indikator Perangkat Daerah Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target 2021
1	2	3	4	5
1	Menguatkan ketahanan sosial masyarakat	Menguatnya ketahanan sosial masyarakat	Jumlah konflik Ipoleksosbud Jumlah konflik SARA Persentasi konflik Ipoleksosbud yang diselesaikan Persentasi konflik SARA yang diselesaikan Persentasi LSM/Ormas/Parpol yang berpartisipasi aktif dalam pembangunan	6 konflik 1 konflik 100% 100% 68,19%

3.3. Program dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan Bakesbangpol Kota Mojokerto yang tertuang dalam Review Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018 – 2023 merupakan serangkaian langkah dari penjabaran strategi –

strategi yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan

sasaran. Rencana program kerja ini akan menjadi pegangan dan acuan Bakesbangpol dalam melakukan kegiatan perencanaan pembangunan Kota Mojokerto dengan lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto pada tahun 2021 mempunyai program kerja yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Kesekretariatan

Kegiatan :

- Pelayanan administrasi perkantoran
- Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

2. Program Pengembangan wawasan kebangsaan

Kegiatan :

- Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa
- Fasilitasi dan koordinasi kegiatan upacara

3. Program Pendidikan politik masyarakat

Kegiatan :

- Penyuluhan kepada masyarakat
- Koordinasi forum diskusi politik

4. Program Pembinaan dan pengembangan kewaspadaan nasional

Kegiatan :

- Pemantapan kewaspadaan nasional
- Pembinaan kewilayahan
- Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Tabel Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel 3.2, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2
 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022
 Kota Mojokerto

Nama Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.05.01.17	Program Pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase masyarakat yg mendapatkan/mengikuti kegiatan wawasan kebangsaan	Kota Mojokerto	4,90%	1.001.042.410,00	APBD		5,04 %	1.134.317.400,00
1.05.01.17.03	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Jumlah peserta Bela Negara, cerdas cermat	Kota Mojokerto	170 orang	385.939.110,00	APBD		170 orang	451.571.500,00
		Jumlah perusahaan swasta yang dibina wawasan kebangsaan	Kota Mojokerto	6 perusahaan					
		Jumlah peserta pendidikan wawasan kebangsaan	Kota Mojokerto						
1.05.01.17.07	Fasilitasi dan koordinasi kegiatan upacara	Jumlah upacara rutin, hari besar nasional, HUT Kemerdekaan RI, hari jadi Kota, hari santri yang diselenggarakan sesuai SOP	Kota Mojokerto	23 kali	615.103.300,00	APBD		23 kali	682.745.900,00

1.05.01.21	Program Pendidikan politik masyarakat	Persentase ORMAS/LSM/PARPOL yg telah memenuhi persyaratan	Kota Mojokerto	68,95%	663.926.600,00	APBD		69,89%	730.319.260,00
1.05.01.21.01	Penyuluhan kepada masyarakat	Jumlah LSM/Ormas/Parpol yang dibina	Kota Mojokerto	200 orang	333.800.000,00	APBD		200 orang	366.850.000,00
		Jumlah LSM/Ormas/Parpol yang berpartisipasi dalam jambore	Kota Mojokerto	200 orang					
		Jumlah LSM/Ormas yang mengikoti forum diskusi Ormas	Kota Mojokerto	100 orang					
1.05.01.21.03	Koordinasi forum diskusi politik	Jumlah peserta Forum diskusi Politik, Bintek bantuan keuangan Parpol, FGD penguatan etika dan budaya politik demokratis.	Kota Mojokerto	360 orang	180.000.000,00	APBD		360 orang	189.000.000,00
		Jumlah Parpol yang terdaftar dan yang dibina	Kota Mojokerto	9 kelompok					
		Jumlah laporan pemantauan perkembangan politik, verifikasi bantuan keuangan Parpol	Kota Mojokerto	4 laporan					
1.05.01.23	Program Pembinaan dan pengembangan kewaspadaan nasional	Persentase konflik SARA yang ditangani	Kota Mojokerto	100 %	3.082.511.340,00	APBD		100 %	3.390.762.474,00

1.05.01.23.07	Pemantapan kewaspadaan nasional	Jumlah Rakor FKDD & FKDM dan Fasilitas ketahanan bangsa.	Kota Mojokerto	27 kali	862.042.450,00	APBD		27 kali	948.246.695,00
		Jumlah Rakor Tin Terpadu Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Kota Mojokerto	6 kali					
		Jumlah peserta deseminasi P4GN	Kota Mojokerto	100 orang					
1.05.01.23.08	Pembinaan Kewilayahan	Jumlah pembinaan wilayah	Kota Mojokerto	18 kelurahan	1.855.239.750,00	APBD		18 kelurahan	2.040.763.725,00
		Jumlah Rakor Forkopimda yang diselenggarakan	Kota Mojokerto	8 kali					
1.05.01.23.09		Jumlah study komparasi yang diikuti Forpimda	Kota Mojokerto	1 kali					
	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Jumlah konflik SARA yang ditangani	Kota Mojokerto	1 kali	365.229.140,00	APBD		1 kali	401.752.054,00
		Jumlah pembinaan Forum Pembauran kebangsaan (FPK)	Kota Mojokerto	13 kali					
		Jumlah Rakor FKUB	Kota Mojokerto	10 kali					
		Jumlah Rakor Tim Instruksin hari besar keagamaan	Kota Mojokerto	4 kali					

1.05.01.12	Program pelayanan kesekretariatan	Persentase sarana dan prasarana perangkat daerah yang tersedia secara cuku dan dengan kualitas baik	Kota Mojokerto	100%	1.006.395.700,00	APBD		100%	1.168.002.240,00
1.05.01.12.01	Pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah rekening telepon , listrik, internet dan PDAM yang dibayarkan tepat waktu	Kota Mojokerto	12 bulan	713.526.070,00	APBD		12 bulan	795.878.500,00
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dirawat secara berkala	Kota Mojokerto	11 unit					
		Jumlah pengelola keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Kota Mojokerto	10 orang					
		Jumlah petugas kebersihan dan sopir yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Kota Mojokerto	4 orang					
		Jumlah peralatan kerja kantor yang diparbaiki	Kota Mojokerto	50 unit					
		Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	Kota Mojokerto	27 unit					
		Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kota Mojokerto	8 macam					
		Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Kota Mojokerto	11 macam					
		Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibaca/ dimanfaatkan	Kota Mojokerto	2 macam					
		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Kota Mojokerto	37 macam					
		Jumlah makan dan minum kantor yang disediakan	Kota Mojokerto	1200 kotak					

		Jumlah pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas luar daerah	Kota Mojokerto	200 kali					
1.05.01.12.02	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah perlengkapan gedung kantor	Kota Mojokerto	11 unit	278.203.400,00	APBD		11 unit	306.023.740,00
		Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	Kota Mojokerto	10 unit					
		Jumlah kebutuhan komputer dan kelengkapannya	Kota Mojokerto	4 unit					
		Jumlah gedung/kantor yang dipelihara	Kota Mojokerto	1 unit					
		Jumlah petugas keamanan rumah jabatan/dinas/gedung kantor yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	Kota Mojokerto	2 orang					
		Jumlah pakaian khusus	Kota Mojokerto	60 potong					
1.05.01.12.03	Pengelolaan administrasi keuangan	Jumlah laporan keuangan (Neraca, CALK, LRA, RKA, RKAP, DPA, DPAP)	Kota Mojokerto	7 dokumen	10.000.000,00	APBD	-	7 dokumen	11.000.000,00
1.05.01.12.04	Penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan (RENSTRA, RENJA, RENJA Perubahan, LPPD, LKPJ, SAKIP, PK, RTP, Lap. Kinerja, SPIP, Sinovik, SOP)	Kota Mojokerto	12 dokumen	40.000.000,00	APBD		12 dokumen	44.100.000,00
1.05.01.12.05	Pengembangan data dan sistem informasi	Jumlah buku Profil yang disusun	Kota Mojokerto	10 buku	10.000.000,00	APBD		10 buku	11.000.000,00
					5.819.709,82000				6.423.401.374,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto pada tahun 2021, Rencana kerja dan pendanaan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemahaman kesatuan bangsa.

Program yang dilakukan pada urusan kesatuan bangsa adalah :

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, kegiatannya :

- Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dengan pendanaan Rp. 385.939.110,-
- Fasilitasi dan koordinasi kegiatan upacara, dengan pendanaan Rp. 615.103.300,-
- Pendidikan wawasan kebangsaan, dengan pendanaan Rp. 172.926.100,-

2. Mewujudkan stabilitas ketahanan bangsa dan kewaspadaan nasional.

Program yang dilakukan pada ketahanan bangsa dan kewaspadaan nasional adalah :

Program Pembinaan dan Pengembangan Kewaspadaan

Nasional, kegiatannya :

- Pemantapan kewaspadaan nasional, dengan pendanaan Rp. 862.042.450,-
- Pembinaan kewilayahan, dengan pendanaan Rp. 1.855.239.750,-
- Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, dengan pendanaan Rp. 365.229.140,-

3. Mewujudkan kesadaran politik masyarakat dalam berdemokrasi.

Program yang dilakukan pada kesadaran politik adalah :

Program Pendidikan Politik Masyarakat, kegiatannya :

- Penyuluhan Kepada Masyarakat, dengan pendanaan Rp. 354.000.000,-
- Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik, dengan pendanaan Rp. 330.426.600,-

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas

Program yang dilakukan pada urusan manajemen adalah :

Program Pelayanan kesekretariatan, kegiatannya :

- Pelayanan administrasi perkantoran, dengan pendannaan Rp. 713.526.070,-
- Peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dengan pendanaan Rp. 278.203.400,-

BAB V

PENUTUP

a. Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Mojokerto Tahun 2021 berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang disusun berdasarkan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Kota Mojokerto Tahun 2021. Selain itu Renja juga sebagai landasan operasional perencanaan tahunan bagi Dinas/Badan/Lembaga yang isinya lebih memusatkan pada arah , tujuan, sasaran, program dan kegiatan jangka pendek.

Renja merupakan dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas dan profesional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, disiplin, bekerja efisien dan efektif.

b. Kaidah – kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan Renja Bakesbangpol Kota Mojokerto Tahun 2021 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan program kegiatan yang berkualitas dan profesional serta ditunjang dengan Sumber Daya Manusia yang baik. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan tahun 2021, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Kerja sebagai dasar atau pedoman kerja dan sebagai arah kebijakan dalam pagu anggaran program kegiatan yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi secara terakomodir baik secara internal maupun external dalam waktu tertentu (jangka waktu 1 (satu) tahun).
2. Rencana Kerja disusun menindak lanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 pasal 27 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 pasal 37.
3. Rencana Kerja merupakan dokumen Rencana Kerja sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
4. Rencana Kerja disusun sebagai pedoman dan bahan pada RKA dan DPA Tahun 2021.
5. Renja Bakesbangpol Kota Mojokerto Tahun 2021 harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antara sekretariat dan bidang.

c. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja merupakan proses pemikiran yang berdasarkan program dan kegiatan dan tindak lanjut dari kebijakan yang ingin dicapai melalui rumusan visi, misi tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas pelaksanaan dalam kurun waktu satu tahun,

yang merupakan Rencana Kerja Tahunan yang diakomodir dari usulan Musrenbang tingkat kelurahan, Kecamatan dan Kota Mojokerto yang disesuaikan dengan Program kegiatan unggulan Kota Mojokerto tahun 2021, serta pengambil kebijakan kedepannya.

Berdasarkan komitmen tersebut dapat diimplementasikan dengan langkah sebagai berikut :

1. Dalam penetapan dokumen perencanaan harus tepat waktu yang diimplementasikan sesuai dengan pedoman petunjuk pelaksanaan baik berdasarkan perundang-undangan maupun Peraturan Pemerintah, Lembaga ataupun Non Pemerintah.
2. Terwujudnya fungsi koordinasi dalam menyikapi, mengantisipasi maupun penanganan bersama instansi terkait dan forum-forum yang ada dilakukan koordinasi secara cepat dan tepat.

Mojokerto, Juli 2020

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA MOJOKERTO


ANANG FAHRUROJI, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670807 199203 1 005